

ABSTRAK

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan Pembangunan Desa merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa, salah satunya melalui pembangunan infrastuktur desa yang selalu menjadi perhatian khusus dan fokus utama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di desa. Sesuai dengan Peraturan Desa Cisaga No.4 Tahun 2022 tentang RKPDes Tahun 2023 telah memuat berbagai pembangunan infrastuktur yang tentunya harus turut diimplementasikan, agar kebijakan yang telah ditentukan dapat memberikan dampak kepada sasaran kebijakan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan fokus penelitian sesuai pada teori Merilee S. Grindle yang memuat berdasarkan indikator konten kebijakan dan konteks implementasi. Data penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Selanjutnya untuk penentuan informan digunakan melalui metode *purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembangunan infrastuktur di Desa Cisaga secara umum telah dilaksanakan, namun belum optimal jika diukur melalui teori Grindle. Kebijakan pembangunan berdasarkan Perdes No.4 Tahun 2022 tentang RKPDes, dapat terealisasi 10 pembangunan dari 20 rencana pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari indikator konten kebijakan dan konteks kebijakan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Ini terjadi karena kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam perencanaanya terdapat tarik menarik kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat, Kemudian rezim yang berkuasa di desa cisaga berjalan secara otoriter, hal ini dilihat bahwa dalam kepemimpinan kepala desa dan proses pengambilan keputusan kepala desa memiliki kendali terhadap segala program pembangunan tanpa mengindahkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya daya tanggap dan penyampaian informasi dari pemerintah desa dinilai masih kurang responsif terhadap keluhan dan kritikan dari masyarakat, terutama terkait transparansi informasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Cisaga.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Infrastuktur

ABSTRACT

Law No. 6 of 2014 explains that Village Development is an effort to improve the quality of life and welfare of rural communities, one of which is through the development of village infrastructure, which always receives special attention and is the main focus to enhance community welfare and support sustainable economic growth in the village. In accordance with Cisaga Village Regulation No.4 of 2022 concerning the RKPDes for 2023, various infrastructure developments have been included, which must be implemented so that the determined policies can have an impact on the policy targets.

This research is a descriptive study with a qualitative approach and uses a research focus based on Merilee S. Grindle's theory, which includes indicators of policy content and implementation context. The data for this research were obtained through observation, interviews, and field documentation. Next, the determination of informants was carried out using purposive sampling and snowball sampling methods.

The results of this study indicate that the implementation of infrastructure development in Cisaga Village has generally been carried out, but it is not yet optimal when measured using Grindle's theory. The development policy based on Village Regulation No. 4 of 2022 concerning the Village Medium-Term Development Plan (RKPDes) has been realized with 10 developments out of 20 planned developments. This can be seen from the indicators of policy content and policy context that explain that the implementation of development is still not optimal. This happens because the interests that influence the implementation of development, especially in its planning, involve a tug-of-war between the village government and the community. Furthermore, the regime in power in Cisaga village operates in an authoritarian manner, as seen in the leadership of the village head and the decision-making process, where the village head has control over all development programs without considering the aspirations of the community. Furthermore, the responsiveness and dissemination of information from the village government are considered to be lacking in addressing complaints and criticisms from the community, especially regarding the transparency of information related to the implementation of development in Cisaga Village.

Keywords: *Implementation, Policy, Infrastructure Development*